

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI (LPPN)

TAHUN ANGGARAN 2019



**PEMERINTAH NAGARI
SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobil'alamin, Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmad dan Hidayah-Nya, serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN), Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) ini, merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari Sambungo selama satu tahun. Laporan ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan tindak lanjut Rencana Kegiatan bagi Nagari Sambungo khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Wali Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Kami menyadari bahwa, dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) yang kami sampaikan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan, masukan yang dapat membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Nagari Sambungo yang mandiri.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tujuan Penyusunan Laporan.....	1
B. Visi dan Misi Pemerintahan Nagari	2
C. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari	2
D. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari.....	4
BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI.....	7
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	7
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan.....	8
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan.....	8
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat	9
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana.....	9
F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.....	10
BAB III KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI	11
BAB IV PENUTUP	13
A. Kesimpulan.....	13
B. Ucapan Terimakasih.....	13
C. Saran.....	14
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019 (Format A.1)	
2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019 (Format A.2)	
3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019 (Form. B)	
4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah (Format C.1)	
5. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksana Pemabngunan (Format C.2)	
6. Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)	
7. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format I)	
8. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan Desember Tahun 2019	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Penyusunan Laporan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan Keuangan Nagari, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Nagari (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Nagari dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek yaitu aspek hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan Keuangan Nagari menjadi kewajiban Pemerintah Nagari sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Pelaporan ini merupakan salah satu alat pengendalian yang berfungsi untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Nagari.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Nagari Sambungo menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Nagari Sambungo dalam akhir tahun bisa dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat Silaut.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN), merupakan Penjabaran Kinerja Pemerintah Nagari selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, Pemberdayaan Masyarakat Nagari serta Penanggulangan Bencana sekaligus melaporkan capaian-capaian kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun , prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Tahun 2019 ini berisi Penjabaran seluruh laporan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 Tahun. Selain Laporan Kegiatan, juga dijabarkan Laporan Keuangan yaang telah dibelanjakan berdasarkan pada

APBNagari tahun anggaran 2019. Sehingga seluruh Dana yang digunakan sesuai dengan yang telah di anggarkan pada tahun 2019.

B. Visi dan Misi Pemerintahan Nagari

Untuk mewujudkan pemerintahan Nagari yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Pemerintahan Nagari harus memiliki Visi dan Misi. Adapun Visi dan Misi Pemerintahan Nagari Sambungo sebagai berikut :

1. **Visi** :“ Terwujudnya Nagari yang maju, demokratis, dan sejahtera”.
2. **Misi** :
 - a. Peningkatan sumber-sumber ekonomi masyarakat, pengembangan kelompok-kelompok usaha kecil yang bersinergi dengan Bumrag;
 - b. Membangun sebuah sistem pemerintahan yang professional, efektif, dan efisien;
 - c. Membangun solidaritas dan kebersamaan antar tokoh masyarakat dan semua kelompok masyarakat melalui berbagai bidang yaitu keagamaan, sosial, dan budaya;
 - d. Peningkatan pelayanan dasar dibidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga serta organisasi lainnya;
 - e. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar berazaskan mufakat;

C. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari

Program ADD (Alokasi Dana Desa) yang mulai dilaksanakan sejak 2006 dan program DD (Dana Desa) yang dimulai sejak tahun 2015 merupakan permulaan baru bagi desa dalam menjalankan dan mendukung program kerja pemerintah. Dana ADD sangat mendukung dalam upaya pembiayaan bidang administrasi desa sedangkan dana DD sangat berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa.

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sambungo selalu diawali dengan Musyawarah Nagari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, Pemerintah Nagari beserta BAMUS dalam rangka penggalian gagasan. Sebelum dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa, terlebih dahulu akan dilaksanakan musyawarah ditingkat Kampung atau biasa disebut dengan musyawarah penggalian gagasan. Kepala kampung menyampaikan saran maupun kritik tentang penyelenggaraan pemerintahan Nagari maupun pembangunan Nagari yang didapat dari masyarakat nya. Dari

penggalan gagasan tersebut, dapat diketahui permasalahan yang ada di Nagari dan dapat disimpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Selanjutnya beberapa gagasan tersebut dicatat dan dibuat draft nya oleh Tim Penyusun RKP. Sebagai tim penyusun, harus berperan aktif membantu Pemerintah Nagari dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan yang ada di Nagari.

Tidak hanya menyepakati proses pembangunan yang akan dilaksanakan, tim penyusun RKP, Pemerintah Nagari beserta BAMUS juga harus membahas dan menyepakati penyelenggaraan pemerintahan di Nagari seperti kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa yang didalamnya terdiri dari pembangunan Fisik dan Non Fisik, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam hal ini proses penyusunan rencana Pembangunan terutama dalam Pembangunan Fisik, harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas. Dalam hal ini Tim RKP, pemerintah Nagari beserta BAMUS juga harus ikut serta dalam membahas dan menyepakati program proses pembangunan di Nagari.

Kemudian Gagasan-Gagasan mengenai pembangunan di Nagari yang telah dibuat dalam bentuk draf oleh tim RKP, diverifikasi oleh Tim Verifikasi kegiatan kemudian selanjutnya akan dimusyawarahkan ditingkat Nagari atau yang biasa disebut dengan MusrenbangNag. MusrenbangNag ini kemudian menghasilkan beberapa jenis kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Nagari dari dana APBNag yang bersumber dari Dana Desa, Pemerintah kabupaten dari APBD Kabupaten, Pemerintah Provinsi dari APBD Propinsi, atau Pemerintah pusat dari dana APBN. Hasil Musrenbang Nag dibagi 2 (dua) kegiatan, yaitu ;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
2. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis Nagari dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APBNag. Prioritas pembangunan Jangka Menengah Nagari Sambungo periode tahun 2019 sampai dengan 2023 dibagi menjadi empat bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari, bidang pembinaan masyarakat

Nagari, bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

2. Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Nagari merupakan Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat tahunan yang kegiatannya berdasarkan APBNag yang telah disetujui oleh BAMUS dan disahkan oleh Kabag Hukum Kabupaten untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Nagari dengan dana PAD, ADD, DD dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun, kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan Jangka Pendek terdiri dari empat bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembinaan masyarakat Nagari, bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

D. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari

a. Arah Pengelolaan Pendapatan Nagari

1. Pendapatan Nagari bersumber APBN dan APBD Kab
2. Pendapatan Asli Nagari dipungut berdasarkan aturan yang berlaku
3. Pendapatan dari APBN dan APBD Kab dikelola oleh Kaur Keuangan (Bendahara) Nagari.

b. Arah Pengelolaan Belanja Nagari

Belanja Nagari Sambungo terdiri dari sumber Pendapatan Asli Nagari (PAN), Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (APBD Kab), serta Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN). Dana yang telah masuk ke rekening Nagari dipergunakan untuk belanja dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Nagari serta Penanggulangan Bencana.

Adapaun Rincian Belanja pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap dan Tunjangan Wali Nagari
2. Penyelenggaraan Belanja Siltap dan Tunjangan Perangkat Nagari
3. Penyelenggaraan Belanja Tunjangan BAMUS

4. Penyelenggaraan Belanja Operasional Pemerintahan Nagari
5. Penyelenggaraan Belanja Operasional BAMUS
6. Penyelenggaraan Belanja Jaminan Kesehatan Wali Nagari dan Perangkat
7. Penyelenggaraan Belanja Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari dan Perangkat
8. Penyediaan Insentif Pemungut PBB
9. Penyelenggaraan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
10. Pengelolaan Administrasi dan Kerasipan Pemerintah Nagari
11. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan (Musyawarah APB Des Reguler, Musdus, Non Reguler, Musyawarah RPJM dan RKP, APBDes Perubahan, LKPJ dll)
12. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal
13. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Masyarakat
14. Penyelenggaraan Pembangunan Pengadaan Sarana/Alat Peraga
15. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes (Obat, Insentif,KB)
16. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
17. Penyelenggaraan Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu
18. Pembangunan/Pengerasan Jalan Desa
19. Pembangunan Jembatan Desa
20. Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan)
21. Pembangunan/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
22. Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni
23. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, selokan)
24. Pembangunan/Rehab/Peningkatan Jamban Umum/MCK
25. Penyelenggaraan Informasi Publik (Poster, Baliho)
26. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalas Kominikasi Dan Informasi Lokal Desa
27. Penyelenggaraan Tanggap bencana Skala Lokal Desa
28. Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI)
29. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
30. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
31. Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
32. Pembinaan Lembaga Adat
33. Pembinaan PKK

34. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan)
35. Peningkatan produksi Peternakan (Yandunakeswan)
36. Peningkatan Kapasitas Wali Nagari
37. Peningkatan Kapasitas Bamus
38. Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari
39. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
40. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
41. Pengembangan Sraana dan Prasarana Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi
42. Pelatihan Pengelolaan BUMDES
43. Kegiatan Penanggulangan Bencana



BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN NAGARI

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) ialah uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Nagari dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari sesuai dengan kewenangan Nagari. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan Nagari yang tersusun dan terorganisir dengan baik.

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Adapun Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan RKP Nagari Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari
2. Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari
3. Tunjangan Bamus
4. Jaminan Sosial Wali Nagari Dan Perangkat
5. Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari dan Perangkat
6. Operasional Pemerintah Nagari
7. Operasional Bamus Nagari
8. Operasional Pemungutan PBB-P2
9. Penyediaan Sarana dan Prasarana (aset tetap) Pemerintah Nagari
10. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Nagari
11. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari (APB Nag)
12. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Lainnya (Rembug Desa Non Reguler)
13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari(RKP/RPJM)
14. Penyusunan Dokumen Keuangan (APB Nag, APB Nag Perubahan, LKPJ dll)

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Adapun Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Nagari berdasarkan RKP Nagari Tahun 2019 terdiri dari beberapa sub bidang yaitu sebagai berikut :

- *Sub bidang Pendidikan*
 1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA Madrasah Non Formasl Milik Desa
 2. Penyuluhan danPelatihan Pendidikan Bai Masyarakat
 3. Peningkatan Sarana Dan Prasarana/Alat Peraga
- *Sub bidang Kesehatan*
 1. Penyelenggaraan PosKesehatan/Polindes
 2. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Lansia, Insentif, Kelas Bumil)
 3. Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu
- *Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
 1. Pembangunan/Pengerasan Jalan
 2. Pembangunan Jembatan
 3. Peningkatan Gorong, Selokan
 4. Pembangunan/Peningkatan Balai Desa
- *Sub Bidang Kawasan Pemukiman*
 1. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
 2. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman
 3. Pembangunan Jamban/MCK
- *Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika*
 1. Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari
 2. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan /Instalasi Komunikasi dan Informasi Milik Nagari

C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Adapun Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatann Nagari berdasarkan RKP Nagari Tahun 2019 terdiri dari beberapa sub bidang yaitu sebagai berikut:

- *Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum*
 1. Persiapan Tanggap Brncana Skala Lokal Nagari
 2. Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari

- *Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
 1. Penyelenggaraan Festival, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, dll)
- *Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga*
 1. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Nagari
 2. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Nagari
 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
- *Sub Bidang Kelembagaan Adat*
 1. Pembinaan Lembaga Adat
 2. Pembinaan PKK

D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Adapun Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Nagari Nagari berdasarkan RKP Tahun 2019 terdiri dari beberapa sub bidang yaitu sebagai berikut:

- *Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*
 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
 2. Peningkatan Produksi Peternakan (Yandunakeswan)
- *Sub Bidang Peningkatan Kapastias Aparatur Nagari*
 1. Peningkatan Kapasitas Wali Nagari
 2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari
 3. Peningkatan Kapasitas BAMUS
- *Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan keluarga*
 1. Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan
- *Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil*
 1. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi
- *Sub Bidang Dukungan dan Penanaman Modal*
 1. Pelatihan Pengelolaan BUMNAG (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes).

E. Program Kerja Penanggulangan Bencana

- *Sub Bidang Penanggulangan Bencana*
 1. Kegiatan Penanggulangan Bencana

F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

1. Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2019.

Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Nagari telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Angaran 2019. Kemudian setelah dilakukan perubahan anggaran menjadi Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2019, dengan rincian *terlampir pada format A.1*

Rincian Anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 yang terangkum pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019 sebagai berikut :

1 Pendapatan Nagari	1.280.092.759,90	
2. Belanja Nagari	1.248.719.705,53	
2.a. Bid.Penyelenggaraan Pemerintah	439.597.382,43	
2.b. Bid. Pembangunan	650.696.500,00	Peraturan Nagari
2.c. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	77.192.508,00	Tentang
2.d Bid. Pemberdayaan Kemasyarakatan	76.233.314,91	Pertanggung
2.e Bid. Penanggulangan Bencana	5.000.000	jawaban
Jumlah Belanja	1.248.719.705,53	Pelaksanaan
Surplus/Defisit	31.373.054,37	Anggran
3. Pembiayaan Nagari	0,00	Pendapatan dan
3.a. Penerimaan Pembiayaan	18.626.945,63	Belanja Tahun
3.b. Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	Anggaran 2019.
Jumlah pembiayaan Nagari	(31.373.054,37)	
Sisa lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	0,00	

Peraturan Nagari Sambungo Nomor Tahun 2019 tentang Pertanggunjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019, *dengan rincian terlampir pada format B.*

BAB III

KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Nagari Sambungo, tentu juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi diantaranya masalah pembangunan dan SDM, baik SDM Pemerintah Nagari, Lembaga Nagari, maupun warga Nagari Sambungo secara umum. Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sambungo, dapat diurai dalam tabel dibawah ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/ UPAYA YANG DITEMPUH
1.	Pelaksanaan Pemerintah Nagari	1 Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Nagari 2 Peningkatan Realisasi PBB-P2 3 Penataan rencana pembangunan Nagari	Kurangnya Skill (Pengetahuan) Aparat Nagari terkait dengan administrasi Ada sebagian Objek (wajib Pajak) Yang tidak jelas	Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan Pentingnya sosialisasi dalam pembayaran PBB
2	Pelaksanaan Pembangunan	1 Tersedianya sarana air bersih bagi masyarakat 2 Tersediannya Pusat Kesehatan Masyarakat. Tersedianya Sarana Fisik Gedung	Masih Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sarana air bersih Kinerja pengelola sarana air bersih belum maksimal Masih Minimnya sarana prasarana kesehatan.	Menertibkan petugas air bersih secara maksimal Perlu revitalisasi pengurus sarana air bersih Perlu upaya terobosan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan

		Sarana Rumah Tidak Layak Huni	terbatasnya anggaran kegiatan yang diperuntukkan untuk kegiatan RTLH	Mengupayakan pengajuan keinstansi yang berwenang, perkimintan dan Baznas Kab.
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1 Penataan Pos keamanan	Pemanfaatan Sarana Pos keamanan yang belum maksimal	Penertiban pemaanfaat Pos keamanan.
		2 Terciptanya keindahan dan kebersihan lingkungan 3 Meningkatnya pemahaman agama 4 Terwujudnya santri dan santriwati yang mahir dalam baca Tulis Al-Quran 5 Meningkatnya kesejahteraan kader posyandu 6 Terciptanya (SDM) Perangkat Nagari dalam mengelola keuangan Nagari berbasis Siskeudes	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan Kurangnya tenaga ahli (Hafidz) dalam membina baca tulis Alquran Kurangnya pembinaan kader Posyandu Kurangnya perhatian perangkat Nagari dalam mengembangkan SDM secara berkelanjutan	Sosialisasi kebersihan lingkungan dari pemerintah Nagari Mendatangkan tenaga ahli (Hafidz) Mengadakan pelatihan dan pembinaan kader Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1 Terwujudnya keindahan dan kebersihan kantor 2 Ditetapkannya pengurus Bumdes/Bumnag yang baru 3 Peningkatan SDM melalui pelatihan	Petugas kebersihan masih perlu pembinaan dalam kesadaran kebersihan kantor pengurus Bumdes/Bumnag baru masih butuh kan data dan informasi dari pengurus kegiatan yang ada Kurangnya pemahaman materi pelatihan peningktan SDM Terbatasnya alat untuk penanggulangan bencana	Pembinaan dan perhatian khusus petugas kebersihan kantor Mengadakan pertemuan pengurus Bumdes lama dan pengurus Bumdes Baru Membutuhkan pelatihan peningkatan yang berlanjut Pentingnya Sosialisai tanggap Bencana
5.	Penanggulangan Bencana	1 Sudah adanya Anggaran untuk penanggulangan bencana skala lokal		

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Wali Nagari, pada pasal 3 poin 1 *“Laporan penyelenggaraan pemerintah Nagari Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Nagari kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”*.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Pemerintah Nagari Sambungoo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan kami buat dengan sebenar-benarnya. Pada intinya, Pemerintah Nagari Sambungoo sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan Nagari dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat maupun Bidang Penanggulangan Bencana.

Kami menyadari bahwa dalam penyampaian dan penulisan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

B. Ucapan Terimakasih

Selanjutnya kami atas nama Pemerintahan Nagari Sambungoo mengucapkan terimakasih kepada seluruh lembaga-lembaga Pemerintahan Nagari, seluruh Masyarakat Nagari Sambungoo, atas dukungan dan bantuan baik materi maupun tenaga atas keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah tercapai dalam Pemerintahan Nagari. Terimakasih kepada semua pihak atau stakeholder yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta mohon dukungan dan kerjasamanya untuk tahun-tahun yang akan datang.

C. Saran

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Nagari/ WaliNagari, maka kami dari pemerintah Nagari menyarankan agar Kabupaten/Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparat Nagari, terkhusus Pengelola Keuangan dan Tim Penyusun LPPN di Nagari.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Tahun Anggaran 2019 ini dibuat dan disampaikan untuk dibahas dan dirumuskan dalam Keputusan BAMUS Nagari Nagari Sambungo yang berisi catatan ataupun rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya.

